

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami pengetahuan yang telah ada dalam bidang yang diteliti, mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi, dan menunjukkan orisinalitas penelitian baru yang akan dilakukan. Sebelum menyusun penelitian ini, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini nantinya.

1. Fendi Artha Prissando dan Tri Ambulanto (2021), Universitas Kadiri dengan judul penelitian **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Kediri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tergolong cukup baik. Namun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di sungai, kali, selokan, dan di pinggir jalan. Hal tersebut dapat menimbulkan banjir pada musim hujan serta memberikan kesan lingkungan yang kotor dan mengurangi keindahan kota. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat serta belum semua masyarakat mengetahui teknik pemilahan sampah antara sampah organik dan non-organik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Novia Safitri (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul penelitian **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yang berjumlah 13 orang. Analisis data

dilakukan dengan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan cukup optimal, penyediaan tong sampah di depan rumah juga cukup baik, serta dukungan dana dan anggaran yang telah disediakan melalui APBDes. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal seperti ide dan inisiatif masyarakat, perencanaan program, serta pelaksanaan program pengelolaan sampah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, sedangkan faktor pendukungnya adalah tersedianya dana dan anggaran dari pemerintah desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari instansi terkait serta pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai cara pengelolaan dan pemilahan sampah yang baik pada tingkat rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, teori yang digunakan, serta tujuan penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fendi Artha Prissando dan Tri Ambulanto (2021) berlokasi di Kota Kediri dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015. Sementara itu, penelitian Novia

Safitri (2024) dilakukan di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada dua desa. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Pajukungan Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya fasilitas, kurangnya layanan pengangkutan sampah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Slamet (dalam Sri Handini, 2019) yang menekankan tiga aspek utama, yaitu adanya kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi nyata partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Pajukungan Hilir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, memperbaiki layanan pengangkutan sampah, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tentang turut berperan serata suatu aktivitas atau keikutsertaan atau kiprah serta. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" yang bisa diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan untuk ikut serta atau ambil suatu aktivitas organisasi.

Yang dimaksud dengan partisipasi dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus Oxford, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral. Ini bisa bersifat paksaan atau bebas, dimanipulasi atau spontan. Partisipasi pada awalnya adalah definisi politik murni yang dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an. Selama tahun 1970-an, partisipasi mulai dikaitkan dengan tahapan administrasi dengan menambahkan latihan kerja dan proses pelaksanaan sehingga orang atau pertemuan dapat mencari situasi yang tidak dapat didamaikan dan bersaing untuk mendapatkan sedikit sumber daya.

Menurut Wazir dalam (Siti Hajar 2018:30) mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Mikkelsen dalam (Siti Hajar 2018:30) mengemukakan bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

Menurut Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa adalah untuk masukan dan saran yang bermanfaat bagi penduduk dan jaringan yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat. Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan kemudian digabungkan menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etika politik yang memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan.

Menurut H.A.R.Tilaar dalam (Ir. M. Fauzhan Algiffari 2023 : 13) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya. perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Dasmin dalam (Ir. M. Fauzhan Algiffari 2023 : 14-15) partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat (individu/kelompok) secara sadar akibat dorongan dari dalam maupun dari luar dirinya mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan hasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) terhadap keseluruhan proses kegiatan pembangunan, mulai perencanaan sampai pemanfaatan hasil, inilah partisipasi yang sesungguhnya. Dalam unsur-unsur partisipasi terdapat 4 unsur, yakni: Pertama, adanya kesadaran. Kedua, adanya kemauan. Ketiga, adanya kemampuan. Keempat, adanya kesempatan.

Menurut Handini (2019:23) partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri
- c. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa dia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Pemakaian kata partisipasi dijumpai dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan proyek, pemeliharaan suatu proyek termasuk

kegiatan suatu organisasi perkumpulan dan pembangunan masyarakat. Hal ini semua menandakan bahwa kegiatan partisipatif merupakan sesuatu yang populer saat ini.

Dari uraian tdi atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat atau kelompok tertentu secara mental, emosional, fisik dalam suatu kegiatan yang dapat diketahui dari indikator-indikator mengambil inisiatif, ikut merencanakan atau mengambil keputusan, dorongan berkontribusi, rasa memiliki, kehadiran, keikutsertaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Ir. M. Fauzhan Algiffari (2023:15) Adanya berbagai wujud kesatuan kolektif manusia. menyebabkan bahwa kita memerlukan istilah-istilah seperti halnya. istilah "masyarakat". Masyarakat istilah yang dalam bahasa inggrisnya disebut "society" (berasal dari kata Latin "socius", yang berarti "kawan") ini paling lazim dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup. manusia. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab "syaraka", yang artinya "ikut serta, berperan serta".

Menurut Aswasulasikin (2017:39) Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan, untuk menuju tujuan yang sama. Manusia hidup berbudaya dan bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada kultur atau institusi tertentu.

Menurut Arifin dalam (Aswasulasikin 2017:39) Masyarakat adalah kumpulan beberapa manusia yang berada dalam suatu tempat tinggal tertentu, yang berkarakter dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. sehingga akan membentuk satu kultur dalam suatu daerah.

Menurut MacIver dan Page masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah inilah yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan dan masyarakat selalu berubah.

Menurut Ralfph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Soerjono dalam Ikbal Bahua (2018:9) masyarakat setidaknya beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berinteraksi dalam waktu yang tidak singkat yang menghasilkan individu baru yang saling berhubungan serta keterlibatan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan yang kuat antara sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat hakekatnya, bahwa seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana dia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Menurut

Setiadi dan Usman dalam (Aswasulasikin 2017:47-48) merinci ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain:

- 1) Di dalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.
- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
- 3) Sebagian warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang terdiri atas individu dan kelompok yang saling berinteraksi, bekerja sama, dan terikat oleh norma, nilai, serta kebudayaan yang mereka ciptakan. Masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang, memiliki tata cara, wewenang, dan pengawasan sosial yang mengatur perilaku anggotanya. Selain itu, masyarakat juga merupakan kesatuan sosial yang nyata dan terorganisir, di mana hubungan antar individu membentuk struktur yang saling bergantung satu sama lain dalam mencapai keteraturan dan keberlangsungan hidup bersama.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (Sri Handini, 2019:32) Menguraikan bahwa tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan hal-hal seperti: Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan, Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut Fahrudin dalam (Ir. M. Fauzhan Algiffari 2023:16) Secara terminologi, partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (nonelit) dan kelompok yang selama ini mengambil keputusan (elit). Dengan demikian, pemerintah sebagai elit harus bisa menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program yang mereka rencanakan, begitu juga sebaliknya masyarakat harus berpartisipasi dengan sukarela terhadap program yang telah ditetapkan.

Menurut Adil Siswanto (2024:13) Nilai-nilai utama partisipasi masyarakat terdiri dari:

- a. partisipasi masyarakat didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan mempunyai hak terlibat dalam proses pembuatan keputusan
- b. partisipasi masyarakat termasuk janji bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi suatu keputusan;
- c. partisipasi masyarakat memberikan suatu keputusan yang berkelanjutan dengan cara mengetahui dan mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh partisipan termasuk dalam hal ini adalah pembuat keputusan
- d. partisipasi masyarakat memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang berpotensi dipengaruhi oleh suatu kepentingan dalam keputusan;
- e. partisipasi masyarakat merupakan suatu input dari para partisipan dalam hal bagaimana mereka berpartisipasi;
- f. partisipasi masyarakat merupakan suatu input dari para partisipan dalam hal bagaimana mereka berpartisipasi;
- g. partisipasi masyarakat menyediakan berbagai informasi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi dalam berbagai cara yang bermanfaat;
- h. partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada para partisipan bagaimana input mereka dapat mempengaruhi suatu keputusan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan Sumber Daya Manusia. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui kebutuhan dan masalah yang

dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Menurut Adrian Tawai-Yusuf (2017:61) partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang dilakukan dengan kesadaran warga, proses di mana masyarakat sebagai stakeholder terlibat, memengaruhi maupun mengendalikan program di tempat mereka masing-masing secara aktif.

Pentingnya partisipasi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Conyers, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
- b. Masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya
- c. Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam Pembangunan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Holil dalam (Ir. M. Fauzhan Algiffari 2023:17) ada 4 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: komunikasi, iklim sosial, kesempatan untuk berpartisipasi dan kebebasan untuk berprakarsa.

Marhum (2021:141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Faktor Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Definisi terkait sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan". Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Merujuk pada pasal 1 poin 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan UU dapat terdiri:

1. Sampah rumah tangga
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
3. Sampah spesifik.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah spesifik itu adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Untuk sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya. Sedangkan untuk sampah spesifik meliputi:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
2. Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun
3. Sampah yang timbul akibat bencana
4. Puing bongkaran bangunan;
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. Sampah yang timbul secara periodic

UU Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan

menerapkan sistem kumpul angkut buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah mengandalkan sistem end of pipe solution yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah,

pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam Perda. Karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Sri Bebasari dalam (Yudiyanto dan Era Yudistira 2019:10-11) dari Indonesian Waste Forum (IWF) seperti yang tertera dalam mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

1) Aspek Hukum

Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentunya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya

2) Aspek Institusi

Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara khusus

3) Aspek Pendanaan

Adanya paradigma mengenai sampah yang mengkultus dalam masyarakat. Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan, padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.

4) Peran Serta Masyarakat

Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini."Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga.

5) Teknologi

Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel.

Mengelola sampah dari hulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

Konsep 3 R yaitu (1) reduce, mendorong kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, (2) re-use, menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable (sekali pakai buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah dan yang ke (3) recycle yaitu mendaur ulang. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut.

Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-

bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya."

Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik. Ketersediaan infrastruktur ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sampah permukiman kota selain faktor perilaku masyarakat, anggaran, teknologi pengolahan sampah dan partisipasi stakeholders pengelolaan sampah.

C. Kerangka Pemikiran

Setiap kegiatan penelitian ilmiah, harus dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan penelitian dapat tersusun secara sistematis. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah bahwa implementasi sangat perlu dalam melaksanakan kebijakan untuk keterlibatan masyarakat. Dalam menunjang kebijakan publik.

Dalam peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah lainnya, pasal 1 ayat 6-9 menjelaskan bahwa Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang

berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, keseluruhan dan berkesinambungan.

Kondisi wilayah Desa Pajukungan Hilir terbelang sangat rendah dalam hal pengelolaan sampah, terlebih lagi semakin meningkatnya timbulan sampah setiap hari. Di Wilayah Desa Pajukungan Hilir masalah yang kerap terjadi dalam pengelolaan sampah, yaitu:

1. Tingkat kesadaran warga akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih minim, sehingga banyak sampah yang dibuang sembarangan di tepi jalan maupun di sungai
2. Rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong, pemilahan, serta pengelolaan sampah secara mandiri
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, yaitu belum ada Tempat Penampungan Sementara (TPS). kondisi ini membuat sampah kerap menumpuk di depan rumah para warga selama berminggu-minggu dan mengurangi kenyamanan kebersihan.

Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh teori partisipasi masyarakat menurut Slamet (Sri Handini, 2019:32):

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Kerangka pemikiran bertujuan untuk memenuhi suatu proses penelitian.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

